

PUBLIK JABAR

Kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Setuju Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

Anton Atong Sugandhi - PANGANDARAN.PUBLIKJABAR.COM

Jun 19, 2023 - 14:08



PANGANDARAN JAWA BARAT - Rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, setelah kami mencermati dan menyimak penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 maka “dengan ucapan bismillahirrohmanirrohim” kami fraksi partai kebangkitan bangsa (PKB) setuju rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

Demikian dikatakan Haer S.Pdi dalam pidatonya saat menyampaikan pandangan umum

fraksi partai kebangkitan bangsa
atas sambutan bupati terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
daerah tahun anggaran 2022 pada rapat paripurna DPRD Pangandaran, Senin
(19/06/2023).

Disampaikan Haer bahwa, setelah kami menyimak dan mempelajari
penyampaian bupati tentang rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
tahun anggaran 2022, ijin kami sampaikan beberapa hal: dalam undang
undang nomor 9 tahun 2015 perubahan kedua atas undang-undang nomor 23
tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang terkandung makna sebagai
refleksi dari nilai-nilai akuntabilitas dan wahana untuk menganalisis kondisi,
seputar permasalahan dan kinerja pemerintahan daerah ditahun sebelumnya.

Hal ini akan semakin mendorong, tumbuhnya objektifitas dalam memotret kinerja
pemerintah kabupaten yang dilandasi semangat kemitraan yang saling
melengkapi, saling mengisi dan saling berbagi peran dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik;
berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan
keuangan daerah dalam pasal 3 (tiga) ayat 1 (satu) dijelaskan bahwa
pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Maka dari itu pencapaian sasaran prioritas pembangunan yang meyerap APBD
tidak melulu jadi isu politik, lebih dari itu utamakan tepat manfaat jelas feed back
fositip yang real, merata, berkeadilan dirasakan secara massif.

Penggalian PAD wajib dilakukan secara kreatif dengan program yang inovatif dan
berkesinambungan yang pastinya demi kemaslahatan ummat;
masyarakat yang pada hari ini lebih cerdas dan berkualitas dengan konsep
berkeadilan maka pemerintah daerah harus mampu membangun sinergitas kerja
profesional dan terintegrasi yang berorientasi pada kualitas output yg positif,
konstruktif.

Rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, setelah kami mencermati dan
menyimak penyampaian rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 maka “dengan
ucapan bismillahirrohmanirrohim” kami fraksi partai kebangkitan bangsa setuju
rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
tahun anggaran 2022 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

Dalam hal ini kami sepakat akantetapi dengan beberapa catatan sebagai berikut:
meminta kejelasan penjabaran terkait DAK fisik pada dinas kesehatan sebesar
Rp.1.491.000.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah);
meminta kejelasan penjabaran terkait tambahan penghasilan profesi guru PNSD
yang dibiayai dengan DAK non fisik pada dinas pendidikan sebesar
Rp.17.994.236.700,- (tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta
duaratus tiga puluh enam juta tujuh ratus rupiah);

Penjelasan terkait temuan LHP BPK RI tahun anggaran 2022 yang dibatasi peruntukannya yang bersumber dari DAK, Banprov, DID, DBHCHT sebesar Rp.165.888.558.307,- (seratus enam puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh rupiah);

Terakhir kami meminta kejelasan terkait sisa dana Banprov jawa barat tahun 2015 s/d 2022 yang sampai iktisar LHP BPK RI tahun anggaran 2022 terbit belum juga dikembalikan sebesar Rp.17.286.612.680,- (tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam keputusan gubernur jawa barat nomor:900/kep.13-bpkad/2023 tentang perubahan atas keputusan gubernur jawa barat nomor:900/kep.876-bpkad/2022 tentang penetapan sisa bantuan keuangan provinsi kepada daerah kabupaten/kota.

Demikianlah pandangan umum fraksi partai kebangkitan bangsa, kami sampaikan terima kasih atas segala perhatian, semoga semua hal yang kita lakukan senantiasa bermanfaat serta ada dalam limpahan rahmat dan maghpiroh allah.swt. aamiin.

Peduli ummat, melayani rakyat.

Parigi, 19 mei 2023

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran

- Haer, S.Pd.i (ketua)
- Encep Najmudin.SH (sekertaris)